

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Politik Identitas Etnis

Etnisitas berasal dari kata etnik (*ethnos*) yang berasal dari bahasa Yunani. Makna dari *ethnos* merupakan setiap kelompok sosial/etnis yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya. Kuntjaraningrat dalam Liliweri (2005:46) mengungkapkan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Sedangkan Martin Bulmer dalam Liliweri (2005:48) mengungkapkan etnik atau yang selalu disebut kelompok etnik adalah satu kelompok kolektif manusia dalam penduduk yang luas. Memiliki kenyataan atau cerita asal usul yang sama, mempunyai kenangan terhadap masa lalu, yang terfokus pada satu unsur simbolik atau lebih. Mendefinisikan identitas kelompok, seperti kekerabatan, agama, bahasa, pembagian wilayah, tampilan nasionalitas dan fisik. Anggota dari kelompok tersebut menyadari bahwa mereka adalah anggota dari kelompok tersebut.

Hussin Mutalib (1995:39) mengungkapkan :

“kelompok etnis merupakan kategori populasi yang khas di dalam sebuah masyarakat yang lebih besar yang kebudayaannya—didefinisikan secara luas mencakup kebiasaan, norma-norma, dan gaya hidup pada umumnya—biasanya berbeda dari dirinya. Dalam pengertian klasik, etnisitas pada dasarnya dilihat sebagai suatu predisposisi primordial, pembawaan lahir dan instinkif.”

Hubungan etnis menjadi kompleks dan problematik tatkala kelompok-kelompok itu dipisahkan satu sama lain oleh ciri-ciri pembeda yang menimbulkan kesadaran mengenai perbedaan dalam faktor-faktor seperti afiliasi agama, bahasa, status sosial ekonomi, kebangsaan dan kesesuaian-kesesuaian terkait.

Clifford Geertz dalam Hussin Mutalib (1995:39) mengungkapkan etnisitas menjadi karakter, kualitas atau kondisi yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis, ataupun kelompok etnis itu sendiri. Geertz mengidentifikasi berbagai karakteristik askriptif di sekitar kelompok etnis, yaitu ikatan darah, ras, pola-pola dominasi, bahasa, agama, adat istiadat, geografi dan sejarah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, politisasi etnis akan rentan sekali terjadi apabila masalah etnis telah diangkat dalam isu-isu pemilu. Etnis sebagai instrumen politik yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa memang dapat mendorong terjadinya fragmentasi di masyarakat, namun ketika berbicara permasalahan strategi politik, tentunya setiap partai melihat segala kemungkinan agar dapat mengakomodasi apa yang menjadi orientasi pemilih dalam memilih pada Pilkada. Dengan berlangsungnya sentimen-

sentimen etnis dan potensinya untuk mangacaukan atapun dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu, pemerintahan yang dalam hal ini menaungi masyarakat yang majemuk, hendaknya mencurahkan perhatian yang besar sekali dalam upaya menangani dan menanggulangi ”masalah etnis” ini.

Realitas dan kekuatan kelompok-kelompok etnis dalam proses politik saling berkaitan dnegan dipertahankannya secara terus menerus ikatan-ikatan primordial dikalangan komunitas-komunitas etnis dan juga politisasi etnisitas dalam masalah-masalah kenegaraan, terutama melalui proses penekanan, ideologisasi, persatuan, dan modifikasi warisan-warisan budaya kelompok-kelompok etnis yang khas dan unik.

Menurut Ubed Abdilah S dalam *Politik identitas etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas* (2002:76) terdapat tiga pendekatan teoritis yang digunakan dalam melihat fenomena etnisitas.

#### 1. Pendekatan Primordialisme

Primordialisme melihat fenomena etnis dalam kategori sosio-biologis. Pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang disadari secara objek sebagai hal yang ”given” dari sananya dan tidak bisa dibantah.

#### 2. Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan ini dikembangkan oleh *Frederik Barth* yang memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus membangun dan dibangun oleh

manfaat mitologi, suatu hitungan sejarah dari bahasa dan pengalaman masa lampau.

### 3. Pendekatan Instrumentalisme

Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan instrumentalisme. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut adalah salah satu alat atau instrumen dalam politisasi apabila dikaitkan dengan kelompok-kelompok sosial berbasis etnis secara tidak langsung terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu faktor yang juga dapat mempengaruhi dalam pendekatan tersebut, yaitu Primordialisme. Konstelasi sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sifat ikatan primordial yang masih kuat, seperti yang dikatakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983:38), bahwa:

“Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan nonpuritanisme dan lain-lain. Disamping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat dimana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk perekrutan dukungan.”

Pendapat Rusadi Kantaprawira diatas mengingatkan bahwa usaha gerakan kaum elit untuk mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan

subkultur dalam perekrutan dukungan pada saat moment politik tertentu dapat dijadikan sebagai bagian dari indikator primordialisme. Dimana indikator lainnya berupa semangat kedaerahan, kesukuan, keagamaan, puritanisme dan non puritanisme dan lain-lain, semakin memperjelas bahwa hakikatnya primordialisme telah mengakar didalam sosio kultural masyarakat kita dewasa ini. Tentunya primordialisme disini telah ditempatkan pada posisi yang sarat kepentingan. Baik itu kepentingan dari elit politik yang memanfaatkan kelompok primordial maupun kepentingan yang dibawa oleh kelompok primordial itu sendiri.

Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk kolektivitas. Jadi, etnisitas lebih mengacu kepada kolektivitas daripada mengacu pada individu. Ikatan ikatan etnis terwujud dalam kumpulan orang, kelengkapan-kelengkapan primordial seperti derajat, martabat, bahasa, adat-istiadat atau kepercayaan. Kelengkapan kelengkapan primordial tersebut dibebankan kepada setiap anggota yang dilahirkan dalam kelompok tersebut dan menjadikannya serupa dengan kelompok-kelompok lain. Dalam suatu etnis, ada karakteristik yang selalu melekat. Karakteristik tersebut adalah tumbuhnya perasaan berada dalam satu komunitas (*sense of community*) dan “kekitaan” di antara para anggotanya. Karena karakteristik tersebut maka muncullah rasa kekerabatan.

Munculnya, ikatan primordial dalam kehidupan politik disebabkan masyarakat masih terlalu awam dalam politik dan sedang mengalami proses perubahan sosial melalui modernisasi dalam tradisi politik pemerintahan walaupun masih

lemah dan persyaratan teknis bagi suatu pemerintahan yang efektif masih kurang dipahami. Dalam politik praktis eksistensi faktor-faktor emosional dan sentimen psikologis yang biasanya terkait dengan faktor primordial dan SARA adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan dalam setiap kampanye.

Seperti yang diungkapkan Abdul Asri Harahap (2005:116), bahwa:

“Penggunaan simbol-simbol primordialisme dan isu SARA untuk menarik dukungan dan bukannya melalui program-program yang ditawarkan sangat berkorelasi dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pada kandidat untuk mendekati masyarakat lebih menonjolkan pendekatan primordialisme. Hal ini tercermin dari ajakan untuk memilih dengan sentimen kesukuan, agama, golongan, dan wilayah tertentu.”

Mengutip pendapat Abdullah A. Harahap diatas, tentunya primordialisme menurutnya pada saat ini sudah menjadi komoditas politik yang mengarahkan pada bagaimana output dari kualitas pemimpin yang dihasilkan. Dengan mengukur, Apakah kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada dimenangkan oleh pewacanaan primordialisme sebagai instrumen yang mengarahkan masyarakat dalam melakukan pilihan politiknya, atukah kandidat dimenangkan oleh ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh kandidat pada saat Pilkada berlangsung.

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya majemuk pada awalnya memungkinkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan ikatan primordial, seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Awan Mutakin (2004:272), pengelompokan tersebut terdiri dari:

1. Ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah (genealogis) atau keturunan. Dalam kelompok masyarakat akan memperhatikan kelompok kerabatnya dalam setiap organisasi masyarakat.
2. Ikatan Ras atau kesukuan. Ras sebagai ciri fisik seseorang atau masyarakat. Seperti warna kulit, tipe muka, bentuk rambut dan lain-lain, akan berbeda dengan orang lain yang memiliki latar belakang ras yang berbeda pula.
3. Bahasa. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Walaupun berada diantara orang-orang yang berbeda latar belakang daerah dan bahasanya. Kadangkala yang berasal dari suatu daerah akan memiliki logat berbicara sebagai ciri kedaerahannya, begitu pula dalam hal bergaul, berbicara, atau berpidato yang menggunakan bahasa nasional akan turut struktur bahasa daerahnya atau beberapa kata bahasa daerah turut (tersisipi) dalam pembicaraannya.
4. Agama. Masyarakat yang majemuk dalam hal keagamaan akan mementingkan orang-orang yang seagama dalam menempati kedudukan disuatu lembaga, walaupun hal ini tidak mutlak, tetapi dalam menempatkan pimpinan lembaga bersangkutan akan lebih baik apabila memiliki agama yang sama.

Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan terus bertahannya ikatan-ikatan primordial, yang mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok politik dan ekonomi.

### C. Kepemimpinan

Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, apakah perusahaan, lembaga pemerintah, rumah sakit, ataupun organisasi sosial lainnya, akan selalu dikaitkan dengan pemimpin dari organisasi dimaksud. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam menentukan efektivitas maupun tingkat produktifitas suatu organisasi. Banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli, beberapa diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ordway Tead (dalam Kartini Kartono, 1994:49)

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. George R. Terry (dalam Kartini Kartono, 1994:49)

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

3. K. Hemphill (dalam M. Thoha, 1996:227)

Kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk bertidak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.

4. Prof. Kimball Young (dalam Kartini Kartono, 1994:50)

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemauan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain unuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.



Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas unsur-unsur yang ada pada kepemimpinan menurut Hadari Nawawi (1995:15) adalah:

1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin.
2. Adanya orang lain yang dipimpin.
3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain, yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya.
4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat sukarela.
5. Berlangsung berupa proses didalam kelompok atau organisasi, baik besar maupun kecil, dengan banyak maupun sedikit orang yang dipimpin.

Untuk dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain, pemimpin membutuhkan kemampuan dan ketarampilan serta sifat-sifat yang memadai untuk melaksanakan kegiatannya. Sehubungan dengan hal tersebut Ordway Tead dalam Kartini Kartono (1994:38) mengemukakan kemampuan dan sifat pemimpin sebagai berikut:

1. Energi jasmani dan mental, yaitu pemimpin mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa. Demikian juga didukung dengan semangat juang, motivasi kerja, disiplin, dan kesabaran.

2. Kesadaran akan tujuan dan arah, yaitu pemimpin memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan pemimpin tahu persis kemana arah yang akan ditujunya dan memberi manfaat bagi dirinya dan kelompok.
3. Antusiasme, yaitu pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai membangkitkan, optimisme, dan semangat besar pada pribadi pemimpin maupun anggota kelompok.
4. Keramahan dan kecintaan, yaitu kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa menjadi tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak. Sedangkan keramahan juga memberikan pengaruh pemimpin dalam mencapai tujuan.
5. Integritas, yaitu dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin memberikan ketauladanan, agar dia patuhi dan diikuti oleh anggota kelompoknya.
6. Penguasaan teknis, yaitu pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.
7. Ketegasan dalam mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan secara tepat, tegas, dan cepat sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.
8. Kecerdasan, yaitu kemampuan pemimpin untuk melihat dan mematuhi dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial, dan cepat menemukan cara-cara penyelesaiannya dalam waktu yang singkat.

9. Keterampilan mengajar, yaitu pemimpin harus mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya atau anggotanya untuk berbuat sesuatu.
10. Kepercayaan, yaitu bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik, dipengaruhi secara positif dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang benar.

#### **D. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan.**

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hadari Nawawi (1995:74), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu.

Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu:

1. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin.

Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadari Nawawi (1995:78), secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Fungsi Instruktif.

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi konsultatif.

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi.

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

4. Fungsi Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi

sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.

#### 5. Fungsi Pengendalian.

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuana bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

**Gambar 1 . Bagan Kerangka Pikir**

